

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Jerman merupakan salah satu negara Eropa dengan tingkat migrasi yang cukup tinggi dengan segala dinamikanya. Jika ditelusuri, rupanya Jerman memiliki sejarah cukup panjang dalam hal migrasi, tercatat sejak dari abad ke 18, yang ditandai dengan banyaknya warga yang melakukan emigrasi. Namun sejak abad ke 19, perekonomian negara yang cukup maju telah menjadi daya tarik utama bagi banyak orang untuk bermigrasi dan memperbaiki taraf hidup di Jerman. Tak jarang, banyak dari penduduk asing tersebut yang pada akhirnya memilih untuk menetap di Jerman.

Selama beberapa dekade Jerman telah mengalami tingkat migrasi yang tinggi dan menempati urutan pertama di antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam jumlah total penduduk asing. Selama itu pula, migrasi masih memainkan peran yang signifikan di Jerman, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Era pemerintahan Jerman yang silih berganti terus berupaya memperbaiki penanganan migrasi lewat kebijakan-kebijakannya.

Di sepanjang tahun 2015, Jerman bersama negara Uni Eropa lainnya harus menghadapi situasi krisis pengungsi yang didominasi dari kawasan Timur Tengah, dimana jutaan orang melarikan diri dari negaranya akibat perang yang tak kunjung berhenti. Sebagai upaya untuk menangani krisis pengungsi tersebut, Kanselir Angela Merkel selaku pemimpin negara Jerman mencanangkan Kebijakan Pintu Terbuka pada 5 September 2015. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh pengungsi diizinkan datang ke Jerman dan mengajukan permohonan suaka. Mereka juga mendapat berbagai keistimewaan dan diperbolehkan untuk tinggal di Jerman hingga mereka benar-benar memperoleh status sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Hanya berselang beberapa minggu pasca implementasi kebijakan Pintu Terbuka, pemerintah Jerman dibuat kewalahan dengan tingginya arus masuk pengungsi yang terus bertambah

setiap harinya. Kebijakan Pintu Terbuka pada akhirnya mengundang berbagai perdebatan di dalam negara Jerman sendiri. Di satu sisi, kebijakan ini didukung sebagai sebuah tindakan yang mulia dalam melindungi pengungsi dari bahaya. Di sisi lain, tidak semua orang setuju dengan kebijakan tersebut. Kelompok masyarakat sayap kanan ekstrem seperti Pegida, Partai NDP dan AfD seketika muncul sebagai gerakan populis yang menentang kebijakan Pintu Terbuka.

Di samping itu, Merkel harus menghadapi kenyataan buruk ketika beberapa warga imigran Muslim melakukan serangkaian aksi teror terhadap masyarakat Jerman lainnya. Sejak saat itulah, sentimen xenofobia dan islamofobia semakin meningkat di Jerman. Krisis pengungsi telah menjadi isu yang mengganggu dan mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan di Jerman. Kebijakan Pintu Terbuka yang semula disambut optimis oleh masyarakat, kini berbuah pesimisme dan kritik pada kepemimpinan Angela Merkel. Berada di tengah berbagai macam tekanan yang ada, Merkel justru tetap teguh pada kebijakannya untuk menerima pengungsi yang mengalami persekusi politik.

Sikap konsisten Angela Merkel tersebut dipengaruhi oleh sistem keyakinan yang selama ini dimiliki oleh Angela Merkel, yang pada akhirnya membentuk persepsinya dalam mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan kebijakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keyakinan yang selama ini dianut oleh Merkel memiliki peran yang lebih menonjol dalam proses pembuatan kebijakan dibanding dengan realitas yang tengah dihadapinya. Sistem keyakinan Merkel ini terdiri dari realitas masa lalu dan nilai-nilai yang dimilikinya. Pengalaman hidup Angela Merkel selama 35 tahun tinggal di Jerman Timur dan realitas sejarah kelam Jerman di era Nazi dan Perang Dingin telah membentuk persepsi pribadi Merkel dalam memandang para pengungsi Timur Tengah sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dilindungi.

Dengan berbekal nilai Kristen Protestan dan nilai konservatif yang selama ini ditanamkan oleh keluarga dan

partainya, Merkel berupaya mengacu pada cita-cita kemanusiaan Kristen dengan terus berkomitmen membuka pintu negara Jerman demi memberi rasa aman terhadap pengungsi yang hendak mencari perlindungan dari perang dan segala tindak penganiayaan. Sebagai seorang pemimpin, maka sudah merupakan kewajiban bagi Merkel untuk mempertahankan kebijakan Pintu Terbuka sebagai sebuah tanggung jawab moral demi melindungi martabat pengungsi dan mencegah terulangnya bencana kemanusiaan.

Sistem keyakinan inilah yang membantu pembentukan persepsi sebagai dasar utama pertimbangan Merkel untuk menolak atau mengacuhkan berbagai tekanan yang ada. Keputusan Merkel untuk tetap mempertahankan kebijakan Pintu Terbuka membuktikan bahwa sistem keyakinan yang ia pegang teguh selama ini secara dominan telah mengarahkannya dalam mengambil keputusan meskipun ia harus mengalami kerugian secara politik.